

RENCANA KERJA (RENJA) 2019



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MOJOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja tahunan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Resntra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Kerja SKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Kerja SKPD meliputi program dan kegiatan yang sedang dikerjakan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan rencana prioritas kegiatan pembangunan.

Rencana kerja ini disusun untuk menentukan kegiatan beserta jumlah anggaran Tahun 2019 yang akan dituangkan pada ketetapan dengan keputusan Kepala SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bagian Organisasi dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2019;

- b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan Bagian Organisasi untuk Tahun Anggaran 2019
- c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi di lingkungan kerja Bagian Organisasi yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja Tahunan dalam mengisi kerangka Anggaran Tahun 2019 ;
- b. Menjamim terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di Bagian Organisasi;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pmebangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Bab ini berisi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.</p> |
| BAB II | <p>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</p> <p>Bab ini berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.</p> |
| BAB III | <p>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</p> <p>Pada Bab ini berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.</p> |
| BAB IV | <p>PENUTUP</p> <p>Pada Bab ini berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.</p> |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian target kinerja APBD Bagian Organisasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO. URUT 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp.) 3	REALISASI (Rp.) 4	LEBIH/ (KURANG) (Rp.) 5
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1,993,476,350.00	1,906,414,058.00	(87,062,292.00)
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	1,993,476,350.00	1,906,414,058.00	(87,062,292.00)
4.01 . 4.01.03 . 06	Bagian Organisasi	1,993,476,350.00	1,906,414,058.00	(87,062,292.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	128,812,700.00	121,319,950.00	(7,492,750.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	22,576,000.00	22,486,000.00	(90,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29,409,300.00	26,559,300.00	(2,850,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58,012,500.00	58,012,500.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13,514,900.00	9,142,150.00	(4,372,750.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2,900,000.00	2,720,000.00	(180,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	5,240,000.00	5,236,000.00	(4,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000.00	500,000.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	4,740,000.00	4,736,000.00	(4,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	109,860,500.00	106,640,300.00	(3,220,200.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	109,860,500.00	106,640,300.00	(3,220,200.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	<i>Program peningkatan nengawahan sistem</i>	425,673,150.00	401,405,700.00	(24,267,450.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 06	Penyusunan LAKIP	158,076,600.00	152,317,100.00	(5,759,500.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 07	Penyusunan Perjanjian Kinerja	151,398,500.00	144,972,000.00	(6,426,500.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 08	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	106,198,050.00	94,568,600.00	(11,629,450.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	5,000,000.00	4,909,000.00	(91,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 10	Penyusunan Profil SKPD	5,000,000.00	4,639,000.00	(361,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	945,747,800.00	920,232,758.00	(25,515,042.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	344,547,600.00	338,266,258.00	(6,281,342.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 19	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	411,510,750.00	408,316,350.00	(3,194,400.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 20	Penyusunan dan Penerapan Budaya kerja	189,689,450.00	173,650,150.00	(16,039,300.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20	<i>Program peningkatan sistem nengawahan internal dan</i>	131,059,350.00	123,785,300.00	(7,274,050.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 12	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	131,059,350.00	123,785,300.00	(7,274,050.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31	<i>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>	169,011,950.00	152,826,400.00	(16,185,550.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 01	Penyusunan dan Penataan Peraturan Kelembagaan	143,841,650.00	129,601,600.00	(14,240,050.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 31 . 02	Sosialisasi Peraturan Kelembagaan	25,170,300.00	23,224,800.00	(1,945,500.00)

4.01 . 4.01.03 . 06 . 32	<i>Program Pencegahan Korupsi</i>	78,070,900.00	74,967,650.00	(3,103,250.00)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 02	Penyusunan dan Penerapan Zona Integritas	0.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 32 . 03	Penyusunan dan Penerapan SOP	78,070,900.00	74,967,650.00	(3,103,250.00)

Tabel 2.1

Untuk hasil kinerja dari masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Kelembagaan

Pelaksanaan Evaluasi Tuposi dan penataan kelembagaan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan

No.	Nomor Keputusan Walikota	Tentang
1	2	3
1	188.45/1091/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
2	188.45/1091.1/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
3	188.45/1091.2/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
4	188.45/1091.3/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
5	188.45/1091.4/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
6	188.45/1091.5/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.
7	188.45/1091.6/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto.
8	188.45/1091.7/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
9	188.45/1091.8/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Sosial Kota Mojokerto.
10	188.45/1091.9/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto
11	188.45/1091.10/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
12	188.45/1091.11/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto
13	188.45/1091.12/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
14	188.45/1091.13/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
15	188.45/1091.14/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
16	188.45/1091.15/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Mojokerto
17	188.45/1091.16/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto
18	188.45/1091.17/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
19	188.45/1091.18/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
20	188.45/1091.19/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
21	188.45/1091.20/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
22	188.45/1091.21/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
23	188.45/1091.22/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto
24	188.45/1091.23/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto
25	188.45/1091.24/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Inspektorat Kota Mojokerto
26	188.45/1091.25/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
27	188.45/1091.26/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
28	188.45/1091.27/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisis Jabatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Sedang analisa beban kerja yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.3

Data Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah

No.	Nomor Keputusan Sekretaris Daerah	Tentang
1	2	3
1	188.4/1103/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
2	188.4/1104/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto
3	188.4/1105/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto
4	188.4/1106/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
5	188.4/1107/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Inspektorat Kota Mojokerto
6	188.4/1108/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
7	188.4/1109/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
8	188.4/1110/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto
9	188.4/1111/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto
10	188.4/1112/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Sosial Kota Mojokerto
11	188.4/1113/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
12	188.4/1114/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
13	188.4/1115/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto
14	188.4/1116/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
15	188.4/1117/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto
16	188.4/1118/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
17	188.4/1119/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
18	188.4/1120/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto
19	188.4/1121/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
20	188.4/1122/417.111/2017 tentang	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto
21	188.4/1123/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
22	188.4/1124/417.111/2017	Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dari hasil Analisa beban kerja dan evaluasi kelembagaan, ada beberapa perangkat daerah yang belum tepat ukuran antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2. Badan Penelitian dan pengembangan.

Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tepat ukuran karena peraturan Pemerintah Noor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menggandakan jumlah bidang penanaman modal maksimal 2 kali lipat demikian juga dengan badan penelitian dan pengembangan yang karena indikatornya produk hukum. Selain itu beberapa tugas pokok fungsi beberapa perangkat daerah juga masih belum sepenuhnya tepat fungsi, tetapi karena adanya pemilihan kepala daerah di bulan Juni 2018, dimana petahana yang berencana ikut pemilihan kepala daerah tidak boleh melakukan pelantikan 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon Walikota/Wakil Walikota. Sehingga kebijakan evaluasi kelembagaan hanya merubah rincian tugas pokok dan fungsi tanpa merubah nomenklatur jabatan. Perangkat yang Tugas pokok dan fungsi diubah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Keputusan Walikota tentang perubahan rincian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

No.	Nomor Keputusan Walikota	Tentang
1	2	3
1	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
2	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 112 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
3	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 113 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
4	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto
5	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
6	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto
7	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 117 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
8	Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 118 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah ini memang belum selesai karena untuk Unit pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah belum terbentuk. Pemerintah Kota Mojokerto telah mengirimkan surat Nomor : 188.342/3156/417.112/2017 tanggal 22 September 2017 perihal Permohonan Konsultasi Pembentukan UPTD yang diterima pemerintah provinsi Jawa Timur tanggal 28 September 2017 dan telah dilakukan fasilitasi UPT oleh Pemerintah Provinsi Pada tanggal 11 Desember 2017 Tetapi sampai berakhirnya tahun 2017, rekomendasi gubernur terkait pembentukan UPT belum ada.

Realisasi target kinerja indicator prosentase SKPD yang tepat ukuran yang mencapai 92,86% lebih rendah bila dibandingkan dengan target rencana strategis dan perjanjian kinerja yaitu 100%. Realisasi ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100%.

2. Sub Bagian Ketatalaksanaan

Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Hasil Indeks kepuasan masyarakat

NO.	NAMA SKPD	NILAI SKM	KETERANGAN
1.	Kelurahan Wates	80,4	Baik
2.	Kelurahan Kauman	86,6	Sangat Baik
3.	Kelurahan Magersari	89,8	Sangat Baik
4.	Kelurahan Meri	75,9	Baik
5.	Kelurahan Jagalan	79,6	Baik
6.	Kelurahan Purwotengah	87,5	Sangat Baik
7.	Kelurahan Balongsari	80,4	Baik
8.	Kelurahan Kranggan	70,4	Baik
9.	Kelurahan Kedundung	80,4	Baik
10	Kelurahan Gedongan	70,8	Baik
11	Kelurahan Sentanan	81,6	Sangat Baik
12	Kelurahan Pulorejo	83,6	Baik
13	Kelurahan Surodinawan	84,6	Sangat Baik
14	Kelurahan Miji	70,8	Baik
15	Kelurahan Gunung Gedangan	78,7	Baik
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,52	Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78,31	Baik
18	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	74,01	Baik
19	Puskesmas Gedongan	84,86	Sangat Baik
20	Puskesmas Kedundung	83,29	Sangat Baik
21	Puskesmas Wates	83,19	Sangat Baik
22	Puskesmas Blooto	80,44	Sangat Baik

23	Puskesmas Mentikan	84,02	Sangat Baik
24	Badan Kepegawaian	87,29	Sangat Baik

3. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

SKPD yang mengirim LKjIPnya tepat waktu dan sesuai aturan. Yang dimaksud dengan LKJIP yang sesuai aturan adalah LkjiP yang sudah selaras antara yang direncanakan dan yang dilaporkan, dan yang dijadikan dasar adalah nilai SAKIP Perangkat daerah minimal cc, sedang yang dimaksud dengan tepat waktu adalah LkjiP yang dikirimkan kepada Walikota Melalui bagian Organisasi sebelum tanggal 1 maret. Adapun perangkat daerah yang nilai sakipnya minimal CC sebagaimana hasil evaluasi sakip perangkat daerah oleh inspektorat sebanyak 29 perangkat daerah yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2017

No.	Perangkat Daerah	Nilai Sakip
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	BB
2	Bappeko	BB
3	Inspektorat	BB
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	BB
5	Bagian Organisasi	BB
6	Badan Kepegawaian	BB
7	Kecamatan Magersarii	BB
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	B
9	Bagian Umum	B
10	Bagian Adm Perekonomian	B
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	B
12	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	B
13	Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	B
14.	Bagian Humas dan protokol	B
15	Kecamatan Prajurit Kulon	B
16.	Disporabudpar	CC
17.	Dinas Pertanian	CC
18.	Bagian Hukum	CC
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CC
20.	Sekretariat DPRD	CC
21.	Kantor pelayanan Perijinan terpadu	CC
22.	DPPKA	CC
23.	Badan Penelitian dan Pengembangan	CC

No.	Perangkat Daerah	Nilai Sakip
24.	Bagian Adm. Pemerintahan	CC
25.	Dinas Pekerjaan Umum	CC
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	CC
27.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	CC
28.	Dinas Sosial	CC
29.	Bagian Adm Pembangunan	CC

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Indikator Pelayanan Bagian Organisasi Kota Mojokerto sesuai tugas, pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada tabel 2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi PD

Isu-isu Penting yang ada di Bagian Organisasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengevaluasian atas penyusunan peraturan kelembagaan khususnya UPT
2. Peningkatan pelayanan public
3. Zona Integritas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Bagian Organisasi bila dibandingkan dengan RKPD, sesuai dengan uraian sesuai dalam tabel 3 berikut ini :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota Mojokerto yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota.

Sesuai dengan uraian dalam tabel 4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019) yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
- b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
- d. Peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
- b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
- c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
- d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
- e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
- f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

- g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
- h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
- i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

- 1) Implementasi UU Pelayanan Publik
- 2) Pemanfaatan ICT
- 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
- 4) Budaya pelayanan
- 5) *Quick Wins*

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

- 1) Penguatan monev kinerja
- 2) Efektivitas pengawasan
- 3) Sistem pengaduan
- 4) Penerapan *reward and punishment*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dari Renja Bagian Organisasi Kota Mojokerto adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.

Sasarannya adalah semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program Tahun 2019 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ada 5 Program dan terdiri atas 18 kegiatan, adapun rencana program sebagai berikut :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3. Program Kelembagaan
- 4. Program Ketatalaksanaan
- 5. Program AKuntabilitas Kinerja

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah **PENINGKATAN KUALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.**

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKI
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bagian Organisasi

Kode							Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2016)	Target dan Realisasi Tahun (2017)
1							2	3	4	5	6
1							Urusan Wajib				
1	20	1	20				Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian				
1	20	1	20	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			
1	20	1	20	03	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana		790 jam	800 jam

1							2	3	4	5	6
1	20	1	2003	01	06		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala		1 unit	1 unit
1	20	1	2003	01	07		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu		10 orang	9 orang PNS
1	20	1	2003	01	10		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah atk yang disediakan		33 macam	33 macam
1	20	1	2003	01	15		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan yang disediakan		12 koran	12 koran
1	20	1	2003	01	17		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan minum kantor yang disediakan		12 bulan	12 bulan
1	20	1	2003	01	19		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah		125 kali	0
1	20	1	2003	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

1							2	3	4	5	6
1	20	1	2003	02	09		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor		11 unit	0
1	20	1	2003	02	29		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeler	jumlah meubelair kantor yang dipelihara		12 bulan	12 bulan
1	20	1	2003	02	31		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	jumlah komputer dan printer		10 buah	10 buah
1	20	1	2003	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan sumber daya aparatur			
1	20	1	2003	05	02		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peserta bintek perundang-undangan		34 SKPD	35 skpd
1	20	1	2003	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase SKPD yang telah menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai aturan			
1	20	1	2003	06	06		Kegiatan Penyusunan LAKIP	Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai aturan		34 SKPD	30 SKPD
1	20	1	2003	06	07		Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja	jumlah SKPD yang telah menyusun PK tepat waktu		34 SKPD	35 SKPD

1							2	3	4	5	6
1	20	1	2003	06	08		Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah SKPD yang telah menyusun IKU			035 SKPD
1	20	1	2003	06	09		Kegiatan Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	jumlah dokumen renja		1 dokumen	1 buah
1	20	1	2003	06	10		Kegiatan Penyusunan Profil SKPD	Jumlah dokumen profil SKPD		1 dokumen	1 dokumen
1	20	1	2003	20			Program Pencegahan Korupsi				
1	20	1	2003	2001			Penyusunan penerapan Standar Pelayanan Mutu Bersertifikat Internasional (ISO)	ISO Pelayanan		0	0
1	20	1	2003	2002			Penyusunan Penerapan Zona Integritas	Jumlah SKPD yang telah menerapkan Zona Integritas		0	0
1	20	1	2003	2003			Penyusunan Penerapan SOP	SK Kepala SKPD		34 SKPD	35 SKPD
1	20	1	2003	08			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase SKPD yang telah mempunyai anjab, abk			
1	20	1	2003	08	06		Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	jumlah SKPD yang dianjab dan abk		5 SKPD	28 SKPD

1							2	3	4	5	6
1	20	1	2003	08	19		Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Walikota Mojokerto		1 Perwali	1 Perwali
1	20	1	2003	08	20		Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi budaya kerja		34 SKPD	35 SKPD
1	20	1	2003	20			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
1	20	1	2003	20	12		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah SKPD unit pelayanan IKM			0 12 SKPD
1	20	1	2003	31			Program Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
1	20	1	2003	31	01		Kegiatan penyusunan Penataan Peraturan Kelembagaan	jumlah SKPD yang dievaluasi		34 SKPD	35 SKPD
1	20	1	2003	31	02		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kelembagaan	jumlah peserta sosialisasi -		35 SKPD	35 SKPD
			401	03	38		Program Kelembagaan				

1				2	3	4	5	6
401	03	38	01	Kegiatan Penyusunan Peraturan Kelembagaan	prosentase skpd yang tepat ukuran		0	0
401	03	38	02	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peraturan Kelembagaan	prosentase skpd yang telah dievaluasi		0	0
401	03	38	03	Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan	prosentase skpd yang telah menyusun anjab, abk		0	0
401	03	38	04	Kegiatan Pemantapan Penyusunan Evaluasi Jabatan	prosentase skpd yang telah menyusun evaluasi jabatan		0	0
401	03	38	05	Kegiatan Pemantapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	prosentase skpd yang telah menyusun skj		0	0
401	03	39		Program Ketatalaksanaan				
401	03	39	01	Kegiatan penyusunan standar pelayanan publik (SPP)	perwali spp		0	0
401	03	39	02	kegiatan inovasi pelayanan publik (sinovik)	Jumlah proposal yang masuk sinovik		0	0
401	03	39	03	kegiatan standar pelayanan miniman (SPM)	prosentase skpd yang SPMnya terpenuhi		0	0

1					2	3	4	5	6
401	03	39	04	kegiatan penyusunan surve kepuasan masyarakat (SKM)	prosentase SKPD pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan nilai baik			0	0
401	03	39	05	Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (sop)	prosentase skpd yang telah menyusun sop			0	0
401	03	40		Program akuntabilitas kinerja					
401	03	40	01	kegiatan penyusunan LKJIP	prosentase LKJIP yang tepat waktu dan sesuai aturan			0	0
401	03	40	02	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja	prosentase skpd yang telah menyusun perjanjian kinerja tepat waktu			0	0
401	03	40	03	kegiatan penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	prosentase skpd yang telah menyusun IKU dengan smart			0	0
401	03	40	04	kegiatan pembangunan zona integritas	prosentase skpd unit pelayanan yang melakukan pembangunan zona integritas			0	0
401	03	40	05	kegiatan pengembangan budaya kerja	kbk yang aktif			0	0

PD s/d Tahun 2018

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015)		Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)	
Realisasi Renja SKPD Tahun (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
800 jam	100%	0	0	0%

7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
9 orang PNS	100%	9 orang	5 orang	100%
33 macam	100%	0%	0	0%
12 koran	100%	12 koran	12 koran	100%
12 bulan	100%	0	0	0%
0	0%	0	0	0%

7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0	0%	0	0	0%
12 bulan	100%	0%	0	0%
10 buah	100%	12 bulan	12 bulan	100%
35 skpd	100%	0	0	0%
30 SKPD	100%	0	0	0%
35 SKPD	100%	0	0	0%

7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
35 SKPD	100%	0	0	0%
1 buah	100%	0	0	0%
1 dokumen	100%	0	0	0%
0	0%	0	0	0%
0	0%	0	0	0%
35 SKPD	100%	0	0	0%
28 SKPD	100%	0	0	0%

7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 Perwali	100%	0	0	0%
35 SKPD	100%	0	0	0%
12 SKPD	60%	0	0	0%
35 SKPD	100%	0	0	0%
35 SKPD	100%	0	0	0%

7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0	0	100%	100%	100%
0	0	100%	100%	100%
0	0	100%	100%	100%
0	0	100%	100%	100%
0	0	45%	45%	100%
0	0	1 perwali	1 perwali	100%
0	0	1 proposal	1 proposal	100%
0	0	80%	80%	100%

7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0	0	37%	37%	100%
0	0	39%	39%	100%
0	0	90%	90%	100%
0	0	100%	100%	100%
0	0	100%	100%	100%
0	0	10%	10%	100%
0	0	1 kbk	1 kbk	100%

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bagian Organisasi Setda Kota Mojokerto
Kota Mojokero

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA SKPD		
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase SKPD yang sudah menyusun Analisa Jabatan			5 SKPD	5 SKPD	36 SKPD
2	Persentase SKPD yang sudah menyusun dan menerapkan budaya kerja			35 SKPD	35 SKPD	1 SKPD
3	Persentase SKPD yang sudah menyusun Standar Kompetensi Jabatan			5 SKPD	0	36 SKPD
4	Persentase SKPD yang telah menyusun LKjIP tepat waktu			35 SKPD	35 SKPD	31 SKPD
5	Persentase SKPD yang telah menyusun PK sesuai aturan			35 SKPD	35 SKPD	36 SKPD
6	Naiknya nilai LAKIP Kota Mojokerto			B	B	BB
7	Persentase SKPD yang telah Menyusun Perjanjian Kinerja			35 SKPD	35 SKPD	36 SKPD
8	Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPM			35 SKPD	35 SKPD	28 SKPD
9	Persentase SKPD/ unit pelayanan yang bersertifikat Internasional			2 SKPD	0	0
10	Persentase SKPD yang mempunyai survey IKM			14 SKPD	22 SKPD	13 SKPD
11	Persentase SKPD yang menyusun SOP			35 SKPD	35 SKPD	14 SKPD

12	Adanya Perwali tentang Standar Pelayanan Publik (SPP)			1 Perwali	1 Perwali	1 Perwali
13	Persentase SKPD Unit Pelayanan yang menerapkan Zona Integritas			2 SKPD	2 SKPD	3 SKPD
14	Persentase SKPD yang memiliki ukuran yang tepat (Rightsizing)			35 SKPD	35 SKPD	36 SKPD
15	Persentase SKPD yang Sudah Dilakukan MONEV terhadap aspek kelembagaan			35 SKPD	35 SKPD	36 SKPD

	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tahn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36 SKPD	100%	100%	100%	100%	
2 SKPD	15	17%	100%	100%	
36 SKPD	12%	12%	100%	100%	
33 SKPD	85%	85%	100%	100%	
36 SKPD	85%	85%	100%	100%	
BB			100%	100%	
36 SKPD	100%	100%	100%	100%	
28 SKPD	100%	100%	100%	100%	
0	17%	28%	100%	100%	
13 SKPD	32%	80%	100%	100%	
14 SKPD	35%	50%	100%	100%	

1 Perwali	100%	100%	100%	100%	
4 SKPD	17%	28%	100%	100%	
36 SKPD	80%	85%	100%	100%	
36 SKPD	100%	100%	100%	100%	

12.25

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Mojokerto

Nama PD : Bagian Organisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil A	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Organisasi	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	1 buah	27,509,300	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Organisasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bagian Organisasi	jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	7 orang	64,570,500	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bagian Organisasi
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Organisasi	jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan yang disediakan	12 koran	1,860,000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Organisasi
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bagian Organisasi	jumlah makan minum kantor yang disediakan	12 bulan	2,500,000	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bagian Organisasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Bagian Organisasi	jumlah komputer dan printer yang dipelihara	12 buah	7,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Bagian Organisasi
4	Program Kelembagaan					Program Kelembagaan	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Kelembagaan		jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	36 SKPD	89,886,040	Kegiatan Penyusunan Peraturan Kelembagaan	
	Kegiatan monitoring dan evaluasi peraturan kelembagaan		jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	36 SKPD	86,651,650	Kegiatan monitoring dan evaluasi peraturan kelembagaan	
	Kegiatan penyusunan analisa jabatan		jumlah SKPD yang telah menyusun anjab dan abk	36 SKPD	113,675,050	Kegiatan penyusunan analisa jabatan	
	Kegiatan pemantapan penyusunan evaluasi jabatan		jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan	36 skpd	220,733,140	Kegiatan pemantapan penyusunan evaluasi jabatan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kegiatan pemantapan penyusunan standar kompetensi jabatan			14 SKPD	141,656,390	kegiatan pemantapan penyusunan standar kompetensi jabatan	
5	Program Ketatalaksanaan					Program Ketatalaksanaan	
	kegiatan penyusunan standar pelayanan publik (spp)		adanya peraturan walikota mojokerto	1 perwali	137,780,850	kegiatan penyusunan standar pelayanan publik (spp)	
	kegiatan inovasi pelayanan publik (sinovik)		jumlah proposal yang masuk sinovik	1 buah	626,319,500	kegiatan inovasi pelayanan publik (sinovik)	
	kegiatan standar pelayanan minimal (SPM)		jumlah SKPD yang SPMnya tepenuhi	28 SKPD	156,746,950	kegiatan standar pelayanan minimal (SPM)	
	kegiatan penyusunan survei kepuasan masyarakat (SKM)		jumlah SKPD pelayanan yang memiliki survei kepuasan masyarakat dengan nilai baik	13 SKPD	139,887,050	kegiatan penyusunan survei kepuasan masyarakat (SKM)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP)		jumlah skpd yang telah menyusun SOP	14 SKPD	138,637,450	Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	
	Kegiatan penyusunan peraturan ketatalaksanaan		perwali tentang ketatalaksanaan	1 perwali	107,641,600	Kegiatan penyusunan peraturan ketatalaksanaan	
6	Program akuntabilitas kinerja					Program akuntabilitas kinerja	
	Kegiatan Penyusunan LKjIP	Bagian Organisasi	Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai aturan	31 skpd	232,373,900	Kegiatan Penyusunan LKjIP	Bagian Organisasi
	kegiatan penyusunan perjanjian kinerja OPD		jumlah skpd yang telah menyusun perjanjian kinerja tepat waktu	36 SKPD	115,500,000	kegiatan penyusunan perjanjian kinerja OPD	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD		Jumlah SKPD yang telah menyusun IKU dengan SMART	36 SKPD	70,625,000	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	
	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas		Jumlah SKPD unit pelayanan yang menerapkan Zona Integritas	3 skpd	46,650,000	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	
TOTAL					2,528,204,370	TOTAL	

Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(9)	(10)	(11)	(12)
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	1 buah	27,509,300	

(9)	(10)	(11)	(12)
jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	7 orang	64,570,500	
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 koran	1,860,000	
jumlah makan minum kantor yang disediakan	12 bulan	2,500,000	

(9)	(10)	(11)	(12)
jumlah komputer dan printer yang dipelihara	12 buah	7,000,000	
jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	36 SKPD	89,886,040	
jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	36 SKPD	86,651,650	
jumlah SKPD yang telah menyusun anjab dan abk	36 SKPD	113,675,050	
jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan	36 skpd	220,733,140	

(9)	(10)	(11)	(12)
	14 SKPD	141,656,390	
adanya peraturan walikota mojokerto	1 perwali	137,780,850	
jumlah proposal yang masuk sinovik	1 buah	626,319,500	
jumlah SKPD yang SPMnya tepenuhi	28 SKPD	156,746,950	
jumlah SKPD pelayanan yang memiliki survei kepuasan masyarakat dengan nilai baik	13 SKPD	139,887,050	

(9)	(10)	(11)	(12)
jumlah skpd yang telah menyusun SOP	14 SKPD	138,637,450	
perwali tentang ketatalaksanaan	1 perwali	107,641,600	
Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai aturan	31 skpd	232,373,900	
jumlah skpd yang telah menyusun perjanjian kinerja tepat waktu	36 SKPD	115,500,000	

(9)	(10)	(11)	(12)
Jumlah SKPD yang telah menyusun IKU dengan SMART	36 SKPD	70,625,000	
Jumlah SKPD unit pelayanan yang menerapkan Zona Integritas	3 skpd	46,650,000	
		2,528,204,370	

**USULAN PROGRAM UNGGULAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA PROGRAM UNGGULAN	DINTINDAKLANJUTI DI RENJA SKPD TAHUN 2018			STATUS US
		KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI No. 13/2006)	PAGU ANGGARAN	BARU
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM KETATALAKSANAAN	4 401 4010306 39			v
			01	Kegiatan Penyusunan Sandar Pelayanan Publik (SPP) 133,622,750	v
			02	Kegiatan Inovasi pelayanan publik (SINOVIK) 384,285,850	v
			03	Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 189,008,850	v
			04	Kegiatan Penyusunan Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) 176,083,050	v
			05	Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 176,291,350	v
			06	Kegiatan Penyusunan Peraturan Ketatalaksanaan 120,710,500	v

JUMLAH	1,180,002,350
--------	---------------

SULAN RENJA SKPD	
LANJUTAN	KETERANGAN
7	8

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Pro
Tahun Anggaran 2019 Kota Moj

Nama PD : Bagian Organisasi

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan
(1)	(2)	(4)
0.00..401.0103.0306.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran
0.00..401.0103.0306.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala
0.00..401.0103.0306.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu
0.00..401.0103.0306.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
0.00..401.0103.0306.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan yang disediakan
0.00.401.0103.0306.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
0.00.401.0103.0306.06.01	penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	
4.01.401.0103.0306.31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prosentase SKPD yang tepat ukuran
4.01.401.0103.0306.31.03	Kegiatan Penyusunan Peraturan Kelembagaan	jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)
4.01.401.0103.0306.31.04	Kegiatan monitoring dan evaluasi peraturan kelembagaan	jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)
4.01.401.0103.0306.31.05	Kegiatan penyusunan analisa jabatan	jumlah SKPD yang telah menyusun anjab dan abk
4.01.401.0103.0306.31.06	Kegiatan pemantapan penyusunan evaluasi jabatan	jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan
4.01.401.0103.0306.31.07	kegiatan pemantapan penyusunan standar kompetensi jabatan	

(1)	(2)	(4)
4.01.401.0103.0.3 06.31.09	kegiatan inovasi pelayanan publik (sinovik)	jumlah proposal yang masuk sinovik
4.01.401.0103.0.3 06.31.10	kegiatan standar pelayanan minimal (SPM)	jumlah SKPD yang SPMnya tepenuhi
4.01.401.0103.0.3 06.31.11	kegiatan penyusunan survei kepuasan masyarakat (SKM)	jumlah SKPD pelayanan yang memiliki survei kepuasan masyarakat dengan nilai baik
4.01.401.0103.0.3 06.31.12	Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	jumlah skpd yang telah menyusun SOP
4.01.401.0103.0.3 06.31.14	Kegiatan Penyusunan LKjIP	Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan sesuai aturan
4.01.401.0103.0.3 06.31.15	kegiatan penyusunan perjanjian kinerja OPD	jumlah skpd yang telah menyusun perjanjian kinerja tepat waktu dan sesuai aturan
4.01.401.0103.0.3 06.31.16	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	Jumlah SKPD yang telah menyusun IKU dengan SMART
4.01.401.0103.0.3 06.31.17	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah SKPD unit pelayanan yang menerapkan Zona Integritas
TOTAL		

**ogram dan Kegiatan
okerto**

Target Capaian	Pagu 6 juli 2018	Pagu Efisiensi 25 juli 2018
(5)	(6)	(12)
1 buah	27,509,300	27,509,300
9 orang	47,690,000	47,690,000
	16,500,000	16,500,000
12 buah	1,860,000	1,860,000
	3,000,000	3,000,000
36 SKPD	88,486,040	88,486,040
36 SKPD	81,501,650	81,501,650
36 SKPD	47,775,050	47,775,050
36 skpd	205,583,140	115,583,140
14 SKPD	130,250,390	130,250,390

(5)	(6)	(12)
1 buah	280,152,920	220,152,920
28 SKPD	45,000,000	45,000,000
13 SKPD	138,391,340	138,391,340
14 SKPD	142,137,490	142,137,490
31 skpd	136,116,600	155,118,350
36 SKPD	104,470,900	104,470,900
36 SKPD	79,001,750	-
3 skpd	91,362,300	91,362,300
	1,666,788,870	1,456,788,870

efisiensi

210,000,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2014-2019. Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kegiatan selama 1 tahun anggaran yang dibahas dalam Musrembang daerah yang dilengkapi dengan pendanaannya dan sebagai dasar Rencana Kegiatan Anggaran beserta perincian Penggunaan Anggaran dengan mencantumkan Kode Rekening, Program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Tahunan akan sangat membantu dalam penyusunan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang lebih diprioritaskan. Sedangkan prioritas program pembangunan pada Bagian Organisasi Tahun 2019 adalah **Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik**.

Semoga penyusunan rencana Kerja tahun 2019 bisa terpenuhi dan terlaksana kegiatannya dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Mojokerto.

Mojokerto, 8 Maret 2018
Kepala Bagian Organisasi

ISTIBSYAROH, SH
Pembina
NIP. 19730124 199803 2 004